

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum organisasi dapat di kategorikan ke dalam beberapa sektor. Menurut Mardiasmo (2018:3) dalam bidang pembukuan atau keuangan yang berkaitan dengan akuntansi biasanya merupakan sektor publik dan sektor swasta dan memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta memiliki banyak perbedaan yang signifikan perbedaan sifat dan karakteristik yang muncul pada akuntansi sektor publik dan sektor swasta di karenakan faktor perbedaan lingkungan yang sangat berpengaruh. Namun di sisi lain sektor publik dan sektor swasta memiliki banyak kesamaan seperti merupakan bagian dari sistem ekonomi suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi, keduanya mengalami masalah kelangkaan sumber daya (*scarcity of resources*), pada dasarnya proses pengendalian manajemen dan manajemen keuangan sama pada kedua sektor, baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak dalam bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya, kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain.

Mardiasmo (2018:17) Sektor publik merupakan sektor yang bergerak dalam pelayanan publik di karenakan sektor publik antara lain meliputi badan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perusahaan milik negara, organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi nirlaba. Bisa di simpulkan pada dasarnya sektor publik sangat berpengaruh dalam bidang

keuangan negara oleh karena itu akuntansi sektor publik harus memiliki data yang relevan serta keuangan pemerintah harus teratur sesuai bagiannya. Keuangan pemerintah harus selalu berjalan agar segala permasalahan publik dapat terselesaikan oleh karena itu anggaran keuangan Pemerintah Daerah harus selalu terstruktur maka di susunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD atau biasa yang di sebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rencana anggaran daerah untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan daerah. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2019 APBD merupakan rencana anggaran tahunan pemerintah daerah agar dapat mengatur segala kondisi keuangannya seperti pendapatan dan pengeluaran keuangan daerah. APBD juga mencakup dana pengeluaran daerah untuk kegiatan pemerintah daerah seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan.

APBD merupakan instrumen penting dalam pengaturan keuangan daerah dan juga sebagai acuan untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintah daerah dalam membangun daerahnya. Agar pembangunan dan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar di perlukan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau biasanya di sebut alokasi belanja modal. Hubungan antara anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan belanja modal adalah bahwa belanja modal merupakan salah satu bagian dari APBD. APBD merupakan rencana keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Belanja modal termasuk dalam kategori pengeluaran APBD yang ditujukan untuk investasi pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, gedung, jembatan, dan

fasilitas publik lainnya. Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) terdiri dari dua komponen utama yaitu pendapatan dan belanja. Pendapatan APBD berasal dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, hibah, dan lain-lain. Sedangkan, belanja APBD terbagi menjadi beberapa jenis belanja, salah satunya adalah belanja modal.

Belanja modal memiliki peran penting dalam pembangunan daerah karena merupakan investasi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui belanja modal diharapkan dapat memberi dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki aksesibilitas. Dalam APBD, anggaran belanja modal ditentukan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Proses pengalokasian anggaran belanja modal didasarkan pada analisis kebutuhan infrastruktur serta ketersediaan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Selain itu, hubungan antara APBD dan belanja modal juga terkait dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Proses perencanaan APBD melibatkan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, yang kemudian menghasilkan program dan kegiatan pembangunan yang memerlukan belanja modal. Selanjutnya, pelaksanaan belanja modal dilakukan berdasarkan alokasi dan penggunaan dana yang telah diatur dalam APBD. Evaluasi juga dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja modal serta dampak yang telah dicapai. Dalam kesimpulan, belanja modal merupakan salah satu komponen dari APBD yang memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan

pelayanan publik. Anggaran belanja modal ditentukan berdasarkan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan pemerintah daerah. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belanja modal dilakukan dalam keseluruhan proses penyusunan APBD.

Belanja modal sendiri merupakan pembelian pemerintah daerah untuk mengganti aset modal seperti bangunan, peralatan, mesin, dan teknologi. Belanja modal juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi untuk menghasilkan barang dan jasa. Belanja modal juga dapat meningkatkan daya saing dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran Belanja Modal merupakan pengeluaran pembayaran untuk perolehan aset dan menambah nilai aset tetap, aset lainnya memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset yang di tentukan oleh pemerintah. Karna itu alokasi belanja modal ke pemerintah daerah sangat di harapkan agar dapat mendorong perekonomian daerah agar dapat lebih berkembang. Belanja modal sangat berpengaruh pada realisasi anggaran pemerintah daerah, agar tugas pemerintah dapat berjalan dengan lancar di perlukan alokasi belanja modal yang baik dan teratur, untuk itu pendapatan pemerintah daerah di dapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang di ambil dari pendapatan daerah tersebut, seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal tingginya Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap infrastuktur Daerah jika memiliki Pendapatan Asli Daerah

yang cukup maka memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun fasilitas-fasilitas masyarakat seperti jalan, jembatan, gedung, dan beberapa fasilitas Daerah lainnya untuk menunjang infrastruktur Daerah. Hubungan antara belanja modal dan pendapatan asli daerah adalah bahwa belanja modal merupakan salah satu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggunakan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan utama yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan alam, dan lain-lain.

Pemerintah daerah menggunakan pendapatan asli daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, termasuk belanja modal. Belanja modal digunakan untuk membiayai investasi pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan kata lain, hubungan antara belanja modal dan pendapatan asli daerah adalah bahwa pendapatan asli daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal yang diperlukan dalam upaya pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal. Dalam hubungan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pendapatan asli daerah cukup untuk menutupi belanja modal yang direncanakan. Jika pendapatan asli daerah tidak mencukupi, pemerintah daerah perlu mencari sumber pendanaan lain, seperti pinjaman atau dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan keseimbangan antara belanja modal dan pendapatan asli daerah. Terlalu banyak menggunakan pendapatan asli daerah untuk belanja modal dapat mengakibatkan ketidakseimbangan anggaran dan mengganggu

kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan anggaran yang baik, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, dan menjaga keseimbangan antara belanja modal dan pendapatan asli daerah. Dengan melakukan hal ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan keberlanjutan keuangan daerah. Dalam konteks hubungan antara belanja modal dan pendapatan asli daerah, belanja modal dapat dipandang sebagai penggunaan pendapatan asli daerah untuk investasi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas umum di daerah. Pendapatan asli daerah yang digunakan untuk belanja modal dapat menjadi indikator penting mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan investasi di daerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana ke belanja modal yang dapat mendukung kemajuan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, perlu diingat bahwa tidak semua pendapatan asli daerah dapat langsung digunakan untuk belanja modal. Pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan kebutuhan belanja operasional, seperti gaji pegawai, pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada, dan program-program pelayanan publik lainnya. Penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara belanja modal dan pendapatan asli daerah. Jika belanja modal melebihi pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat mengalami defisit anggaran yang berdampak negatif pada keuangan daerah. Sebaliknya, jika belanja modal terlalu rendah, pembangunan dan investasi di daerah tersebut dapat terhambat. Dalam hal

ini, pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan yang matang, termasuk mengidentifikasi sumber pendapatan asli daerah potensial dan mengelola belanja modal dengan efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah serta mengembangkan potensi ekonomi daerah. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah juga dapat mengandalkan pendanaan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer atau bantuan keuangan untuk melengkapi pendapatan asli daerah dan membiayai belanja modal yang lebih besar. Namun, bergantung terlalu banyak pada dana transfer dapat menimbulkan ketergantungan dan ketidakseimbangan fiskal dalam jangka panjang.

Dalam rangka memastikan hubungan yang seimbang antara belanja modal dan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana belanja modal, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas investasi serta memaksimalkan manfaat pembangunan bagi masyarakat di daerah tersebut. Secara keseluruhan, hubungan antara belanja modal dan pendapatan asli daerah saling terkait dan saling mempengaruhi. Pendapatan asli daerah menjadi sumber utama untuk membiayai belanja modal, sementara belanja modal merupakan investasi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah tersebut. Pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara kedua elemen ini agar pembangunan berjalan lancar dan keuangan daerah tetap sehat.

Pentingnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang baik dapat berpengaruh baik ke Belanja Modal agar menurunnya tindak resiko penggunaan

dana yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan.

Bagian terkait di dalam pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah Bagian ini meliputi berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada warga atau badan usaha yang beroperasi di daerah tersebut. Contoh pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak sarang burung walet, dan lain sebagainya.
2. Retribusi Daerah Merupakan pungutan oleh pemerintah daerah untuk penggunaan fasilitas dan pelayanan umum yang disediakan. Contoh retribusi daerah adalah retribusi parkir, retribusi terminal, retribusi pasar, retribusi kebersihan, dan lain sebagainya
3. Bagian Hasil Pengerahan Kekayaan Alam dan Sumber Daya Alam (BHP) Meliputi penerimaan dari eksploitasi sumber daya alam seperti hasil tambang, hasil hutan, hasil perikanan, dan sebagainya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola penerimaan dari sektor ini.
4. Bagian Laba Usaha BUMD Pendapatan asli daerah juga bisa berasal dari laba usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. BUMD merupakan perusahaan yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah daerah dan menghasilkan keuntungan dari berbagai sektor seperti energi, air, transportasi, dan lain sebagainya.
5. Bagian Pendapatan Lain-lain Merupakan komponen pendapatan asli daerah lainnya yang tidak termasuk dalam kategori pajak, retribusi, BHP,

dan laba usaha BUMD. Contohnya bisa berupa penerimaan dari aset daerah, denda, iuran, sanksi administrasi, dan lain sebagainya.

Semua bagian terkait ini penting untuk mendukung pencapaian pendapatan asli daerah yang optimal. Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan asli daerah agar dapat memaksimalkan potensi PAD dan memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terutama agar pengalokasian dana dapat berjalan dengan baik. Berikut ini merupakan tabel data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal tiga tahun terakhir pada tahun 2020-2022.

Tabel 1.1 Lapoan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal pada Tahun 2020-2022

Tahun	PAD (X)	Belanja Modal (Y)
2020	1.125.317.788.015,59	1.090.984.905.420,00
2021	1.310.528.740.581,31	1.031.253.909.110,00
2022	1.464.716.968.806,24	818.966.382.272,71

Sumber : Data Olahan

Tabel di atas merupakan data Realisasi Anggaran pendapatan asli daerah dan belanja modal pada tahun 2020 dan 2022. Dapat di lihat untuk PAD mengalami peningkatan sejara berturut-turut' sedangkan belanja modal mengalami penurunan sejara berturut-turut.

Peneliti memilih artikel penelitian tedahulu yang metode dan pengujian datanya hampir sama dengan penelitian ini namun masih ada perbedaan dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

pengambilan tahun dan tempat yang berbeda peneliti memperoleh data di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara sedangkan penelitian terdahulu bertempat di Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis memilih pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara Pemerintah Daerah Sulawesi Utara adalah pemerintahan daerah yang terletak di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Pemerintah daerah ini dipimpin oleh seorang Gubernur yang saat ini dijabat oleh Olly Dondokambey.

Pemerintah Daerah Sulawesi Utara memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Sulawesi Utara. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai instansi dan lembaga. Beberapa instansi tersebut antara lain:

1. Dinas – dinas : Terdapat berbagai dinas yang bertanggung jawab dalam bidang-bidang tertentu, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Dinas-dinas ini bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik dan menjalankan kebijakan pemerintah di bidang masing-masing.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA): Badan ini bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah Sulawesi Utara, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Badan Kepegawaian Daerah (BKD): Badan ini mengurus administrasi dan pengelolaan kepegawaian di pemerintah daerah Sulawesi Utara, termasuk rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengembangan sumber daya manusia.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Badan ini bertanggung jawab dalam manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah, termasuk anggaran, pengawasan keuangan, dan pengelolaan kekayaan daerah.

Selain lembaga-lembaga di atas, pemerintah daerah Sulawesi Utara juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan pihak swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Beberapa program unggulan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Utara antara lain adalah pengembangan sektor pariwisata, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menjaga kelestarian alam dan budaya daerah. Dalam menjalankan pemerintahan, Pemerintah Daerah Sulawesi Utara juga mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah ini juga aktif dalam melakukan koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan agar program-program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Namun, perlu diingat bahwa informasi yang diberikan di atas dapat berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan dalam pemerintahan daerah Sulawesi Utara. Sebaiknya selalu mengacu pada informasi terbaru dari sumber yang terpercaya jika ingin memperoleh informasi yang akurat mengenai pemerintah daerah tersebut.

Rendahnya realisasi belanja modal dapat mengakibatkan infrastruktur yang sudah sejak dulu tersedia tidak layak dan terhenti pembuatan proyek-proyek baru dan tentunya membuat investasi daerah menurun yang mengakibatkan ekonomi di daerah tersebut menurun dan akan terus bergantung pada APBD untuk dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Di Sulawesi Utara sendiri pada realisasi anggaran terbaru tahun 2022 realisasi untuk belanja modal dan belanja barang mengalami penurunan. Sedangkan untuk belanja pegawai dan belanja barang menjadi belanja terbesar. Padahal belanja modal merupakan komponen penting untuk dapat meningkatkan pelayanan publiknya lewat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada. Untuk itu, penulis ingin mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Sulawesi Utara. Dengan ini Peneliti mengangkat judul **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH SULAWESI UTARA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Sulawesi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Modal.

2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Dapat mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Modal.

3. Penelitian Selanjutnya.

Di harapkan penelitian ini dapat menjadi sumber acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang di gunakan dalam menyusun Skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang: Tinjauan Pustaka, Penelitian Terdahulu, Model Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang: Waktu dan Tempat Penelitian, Populasi dan Metode Pengambilan Sampel, Definisi Operasional Variabel, Metode Pengumpulan Data, Dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum Objek Penelitian, Sejarah Perusahaan, Hasil Analisis, Pembahasan terkait hail analisis yang didapatkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang diberikan terkit hasil penelitian yang didapatkan.